

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan riset Infobank per Juni 2004 terdapat 40 bank di Indonesia yang mempunyai kredit bermasalah. Hal tersebut menjadi ketidakpastian yang harus dihadapi oleh perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabahnya. Kemudian berdasarkan laporan Statistik Perbankan Indonesia untuk Januari 2011 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) terdapat 16 bank yang mempunyai tingkat *Non Performing Loan* (NPL) melebihi batas aman yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 5%.

Seperti yang diterbitkan oleh Kontan (2010) bahwa salah satu bank pemerintah terbesar di Indonesia yaitu bank BRI mengalami masalah dengan kredit macet, tingkat *Non Performing Loan* (NPL) bank BRI meroket naik. Dalam paparan kinerja kuartal dua tahun 2010 tercatat 4,27% naik cukup besar dari tingkat NPL di periode yang sama tahun sebelumnya yang baru sebesar 3,70%. Kenaikan NPL tersebut banyak disebabkan oleh meningkatnya kredit-kredit bermasalah di sektor menengah. Kemudian Kompas (2011) memberitakan bahwa laporan keuangan kuartal satu tahun 2011 sejumlah bank papan atas menunjukkan tren peningkatan *write off* atau penghapusbukuan kredit bermasalah. Menurut para banker tindakan *write off* dilakukan selain akibat kurang hati-hati bank dalam menyalurkan kredit, hapus buku mereka ambil lantaran prospek debitur menurun. *Write off* menjadi pilihan agar kondisi keuangan bank tetap sehat.

Likuiditas dan kredit macet (*Non Performing Loan/NPL*) masih akan menjadi tantangan bagi perbankan pada tahun 2014. Sumbernya terutama ada pada pengusaha atau perusahaan menengah dengan kredit Rp 5 miliar hingga Rp 100 miliar. Hal ini disebabkan karena pengusaha di level ini masih banyak yang agresif dan ingin tumbuh dengan cepat, sehingga kemampuan membayar kredit lebih rendah dibandingkan kapasitas membayarnya (Dirut PT BJB Tbk Bien Subiantoro,2014).

Industri perbankan diminta mewaspadai risiko krisis keuangan yang bersumber dari rasio kredit macet (*Non Performing Loan/NPL*) dan tekanan likuiditas. Potensi risiko kredit macet saat ini mulai patut diwaspadai, terutama untuk sejumlah bank yang memiliki rasio NPL jauh melebihi rata-rata industri (Salamuddin Daeng,2014). Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, rasio NPL nett BTN tercatat sebesar 3.04%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata NPL industri perbankan.

Menurut data statistik perbankan Indonesia (SPI) yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio NPL bank umum pada akhir 2013 adalah 0,012%. Sedangkan rasio NPL bank-bank milik pemerintah pada periode yang sama tercatat sebesar 0,02%. Adapun, rasio NPL bank pembangunan daerah pada 2013 adalah sebesar 0,03%. Rasio NPL tertinggi dicatatkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang pada akhir 2013 telah mencapai 4,41%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau bank-bank beraset besar untuk menekan rasio kredit macet (NPL) kotor di kisaran 2 (dua) hingga 2,5 (dua koma lima) persen. Angka tersebut lebih rendah dari batas NPL yang ditetapkan Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar 5 (lima) persen. Menurutny, jika dihitung meski suatu bank besar

memiliki persentase NPL sama dengan bank kecil, namun nilai kredit bermasalahnya akan lebih besar dibanding bank kecil. Ini karena total kredit bank *breast* besar, tinggi. NPL tiga persen di bank besar bisa saja setara dengan lima besar NPL pada bank BUKU I atau II.

Memang pada dasarnya, pemberian kredit akan dapat berjalan baik serta terhindar dari berbagai kecurangan-kecurangan penyimpangan yang mungkin terjadi apabila manajemen dapat mengelola setiap aktivitas dengan baik pula. Permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain, diperlukan suatu pengendalian yang dapat menunjang efektivitas pemberian kredit.

Pengendalian internal yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan dalam perusahaan, serta mengamankan harta perusahaan.

Alasan perusahaan menyusun pengendalian internal adalah dalam rangka membantu dalam mencapai tujuannya. Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus menerus memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pengendalian internal dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi perusahaannya dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan, serta manfaat yang diharapkan. Arens & Loebbecke

(1999) yang menjadi tujuan pengendalian internal adalah *reliability of financial reporting, efficiency and effectiveness of operation*, serta *compliance with applicable laws and regulation*.

Pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan sama sekali, tetapi pengendalian internal yang memadai akan dapat menekan atau memperkecil terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas yang layak dan walaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi.

Komponen pengendalian internal merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian yang memadai. Agar tujuan pengendalian tercapai, perusahaan harus mempertimbangkan komponen-komponen pengendalian internal.

Pengendalian internal yang bagaimanapun baiknya, tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkannya tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut. Adapun keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal menurut Mulyadi & Puradireja (2002) adalah kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, dan pengabaian oleh manajemen.

Efektivitas sangat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam usaha mencapai efektivitas sistem pemberian kredit, perlu diketahui tujuan pemberian kredit yang diharapkan. Untuk itu, bagian perkreditan perlu menetapkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan pemberian kredit. Dalam hal ini digunakan prinsip perkreditan yang lebih dikenal dengan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan

condition of economic. Apabila prinsip-prinsip tersebut terpenuhi, diharapkan tujuan pemberian kredit akan tercapai. Di samping itu, perlu dilaksanakannya prosedur pemberian kredit yang meliputi permohonan kredit, analisa kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit serta pencairan kredit.

Selain terpenuhinya prinsip dan prosedur pemberian kredit, suatu sistem pemberian kredit dapat dikatakan efektif apabila kredit tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan. Prioritas pemberian kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas sistem pemberian kredit akan tercapai. Setiap bank harus memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah penyalagunaan wewenang.

Dengan berjalannya waktu, beberapa peneliti mulai melakukan penelitian untuk melihat apakah audit intern telah meningkatkan efektivitas dalam penurunan tingkat kredit macet di perbankan. Firdaus (2006) dengan topik peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian intern pemberian kredit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian intern pemberian kredit. Hal ini dapat dilihat dengan dilaksanakannya *complication*, *verification*, dan *evaluation*. Kemudian berdasarkan persentase kuesioner sebesar 84% dipercayai bahwa internal audit dapat menyebabkan risiko kredit macet lebih kecil dan mengurangi kolusi antara personel bagian kredit dan calon debitur.

Munawaroh (2011) menguji peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah. Jurnal ini menunjukkan

bahwa pengendalian internal sangat berperan dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah. Munawaroh (2011) juga mengungkapkan bahwa perlu dilakukannya penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabah tersebut akan mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya agar tidak menimbulkan kredit macet. Kemudian berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan diketahui bahwa peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit usaha kecil dan menengah sebesar 93.65%.

Wina Febriani (2013) meneliti mengenai peranan audit internal dalam menunjang efektivitas kredit investasi. Di dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa besarnya pengaruh peranan audit internal dalam menunjang efektivitas kredit investasi adalah sebesar 50,55%. Hal ini membuktikan bahwa audit internal terbukti mempunyai peranan terhadap efektivitas kredit investasi.

Mengacu pada pembahasan di atas, terlihat bahwa ada hal yang bertolak belakang antara penelitian yang menyebutkan bahwa audit intern memberi pengaruh terhadap penurunan tingkat kredit macet di perbankan dengan data NPL di perbankan yang melebihi batas aman. Berdasarkan fenomena inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul, "**Pengaruh Penerapan Audit Intern terhadap Penurunan Tingkat Kredit Macet di Perbankan: Studi Kasus pada Bank Permata Kota Jakarta.**"

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Adapun permasalahan-permasalahan yang diteliti pada studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah audit intern telah diterapkan secara memadai di PT. Bank Permata Tbk. ?
2. Apakah audit intern berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kredit macet di PT. Bank Permata Tbk. ?

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah audit intern pada PT. Bank Permata Tbk. telah dilaksanakan secara memadai.
2. Untuk mengetahui apakah audit intern telah berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kredit macet di PT. Bank Permata Tbk.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk mengkaji dan meningkatkan wawasan tentang sistem pemberian kredit investasi yang seharusnya diterapkan pada setiap bank untuk mengurangi resiko kredit macet serta konsep audit intern dan pengaruhnya terhadap efektivitas kredit investasi.

2. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam menerapkan sistem yang paling efektif dalam pemberian kredit investasi pada nasabah agar tidak terjadi kredit macet yang akan merugikan bank.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana pengaruh audit intern terhadap pencegahan terjadinya kredit macet yang banyak terjadi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi terpercaya yang dapat kembali dikaji untuk jenis objek yang lain.